



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 tanggal 22 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 22 April 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Hani Purwaka, Ak., CA., CSFA

Register Negara Akuntan, No. RNA - 7704



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Ref.	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN	4.1.1	10.800.944.019.387,00	9.611.291.244.667,17	88,99	9.278.520.060.062,03
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.1.1.1	4.747.088.053.007,00	3.865.463.033.085,17	81,43	3.375.100.984.842,03
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.1.1.1.1	3.500.243.740.082,00	3.523.785.342.246,24	100,67	3.081.800.984.699,61
4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.1.1.2	7.601.707.223,00	9.313.749.306,00	122,52	8.234.552.913,00
4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.1.1.3	101.209.528.648,00	65.714.183.659,07	64,93	82.836.132.369,66
4.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	4.1.1.1.4	1.138.033.077.054,00	266.649.757.873,86	23,43	202.229.314.859,76
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.1.1.2	6.009.694.627.380,00	5.712.683.072.712,00	95,06	5.875.896.342.538,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.1.1.2.1	6.009.694.627.380,00	5.712.683.072.712,00	95,06	5.875.896.342.538,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan		6.009.694.627.380,00	5.712.683.072.712,00	95,06	5.835.674.693.538,00
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	4.1.1.2.1.a-b	2.090.318.706.818,00	1.891.734.449.581,00	90,50	1.933.269.369.100,00
4.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.1.1.2.1.c	1.569.812.039.000,00	1.563.041.287.000,00	99,57	1.568.602.615.000,00
4.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.1.1.2.1.d	246.085.361.448,00	220.514.359.267,00	89,61	203.718.863.552,00
4.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.1.1.2.1.e	2.103.478.520.114,00	2.037.392.976.864,00	96,86	2.130.083.845.886,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	4.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	40.221.649.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian	4.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	40.221.649.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.1.1.3	44.161.339.000,00	33.145.138.870,00	75,05	27.522.732.682,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.1.1.3.1	44.161.339.000,00	33.145.138.870,00	75,05	26.967.232.682,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya	4.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	555.500.000,00
5	BELANJA	4.1.2	11.410.177.341.872,00	10.060.730.260.979,40	88,17	9.517.763.493.965,89
5.1	BELANJA OPERASI	4.1.2.1	5.830.058.901.452,00	5.365.031.503.749,49	92,02	5.038.670.309.775,65
5.1.1	Belanja Pegawai	4.1.2.1.1	2.089.417.475.499,00	1.923.290.549.742,00	92,05	1.771.524.397.218,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.2	2.062.603.115.941,00	1.811.885.209.417,49	87,84	1.392.760.537.519,30
5.1.3	Belanja Bunga	4.1.2.1.3	4.000.000.000,00	382.096.916,00	9,55	939.738.517,79
5.1.5	Belanja Hibah	4.1.2.1.4	1.673.935.310.012,00	1.629.473.647.674,00	97,34	1.873.445.636.520,56
5.1.7	Belanja Bantuan Sosial	4.1.2.1.5	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	4.1.2.2	2.191.283.655.818,00	1.836.834.114.021,94	83,82	1.664.700.767.363,54
5.2.1	Belanja Modal Tanah	4.1.2.2.1	79.703.529.691,00	70.853.405.527,00	88,90	14.597.408.000,21
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.2	336.930.132.385,70	288.834.883.969,24	85,73	181.062.816.387,17
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.1.2.2.3	324.974.441.062,30	289.050.835.757,28	88,95	201.564.960.984,78
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.1.2.2.4	1.365.201.497.824,00	1.107.398.086.860,42	81,12	904.310.171.568,49
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.5	84.474.054.855,00	80.696.901.908,00	95,53	53.768.783.085,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	4.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	215.967.588.496,51
5.2.7	Belanja Modal BLUD	4.1.2.2.7	0,00	0,00	0,00	12.330.403.046,38
5.2.8	Belanja Modal BOS	4.1.2.2.8	0,00	0,00	0,00	81.098.635.795,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	4.1.2.3	15.000.000.000,00	14.055.098.162,00	93,70	197.104.066.604,97
5.3.1	Belanja Tak Terduga	4.1.2.3	15.000.000.000,00	14.055.098.162,00	93,70	197.104.066.604,97
5.4	BELANJA TRANSFER	4.1.2.4	3.373.834.784.602,00	2.844.809.545.045,96	84,32	2.617.288.350.221,73
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.1.2.4.1	1.849.505.412.624,00	1.579.375.912.863,60	85,39	1.455.636.933.603,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	4.1.2.4.2	1.524.329.371.978,00	1.265.433.632.182,36	83,02	1.161.651.416.618,73
	SURPLUS / (DEFISIT)		(609.233.322.485,00)	(449.439.016.312,22)	73,77	(239.243.433.903,86)
6	PEMBIAYAAN	4.1.3				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		711.643.322.485,00	615.159.551.422,81	86,44	474.977.880.806,42
6.1.1	Penggunaan SILPA	4.1.3.1	121.594.476.750,00	121.593.374.660,10	100,00	349.234.370.470,42
6.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	4.1.3.1	590.048.845.735,00	493.566.176.762,71	83,65	125.743.510.336,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		102.410.000.000,00	86.000.000.000,00	83,98	114.114.901.552,00
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.1.3.2	102.410.000.000,00	86.000.000.000,00	83,98	114.114.901.552,00
	PEMBIAYAAN NETTO		609.233.322.485,00	529.159.551.422,81	86,86	360.862.979.254,42
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	4.1.4	0,00	79.720.535.110,59	100,00	121.619.545.350,56

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU